

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti mengemukakan 2 (dua) kesimpulan untuk menjawab 2 (dua) rumusan permasalahan, yaitu: (1) Penyebab Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kota Administrasi Jakarta Selatan mendapat penilaian menurun; dan (2) Strategi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang ideal dipersiapkan pada masa mendatang, seperti diuraikan sebagai berikut:

1. Penjelasan dimaksud sebagai berikut:

- a. Evaluasi *Context* (Konteks)

Didasarkan pada evaluasi aspek *context*, kaitannya dengan indikator Visi dan Misi, Maksud Program, dan Tujuan Program dapat dikatakan para informan kunci memberikan jawaban yang sesuai sejalan dengan aturan terkait. Artinya, hal tersebut telah dipedomani oleh para pemangku kepentingan di wilayah. Pengenalan sebuah program dibuat dengan tujuan yang akan dicapai dapat terjawab. Semua indikator sudah dapat dipahami dengan baik.

- b. Evaluasi *Input* (Masukan)

Melalui evaluasi aspek *input* dimaksudkan untuk menilai sebuah perencanaan dan menganalisa keperluan sebuah program. Dari indikator: Pedoman Pelaksanaan Program, Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana serta Sistem Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Program secara umum para informan kunci menjawab sesuai dengan yang dipahaminya. Namun, perlu peningkatan/perubahan dalam beberapa indikator. Pada indikator Pedoman Pelaksanaan Program, perlu adanya perubahan/revisi dan penyempurnaan Pedoman Program dalam hal ini Peraturan Gubernur yang mengatur teknis untuk

menyesuaikan perkembangan dan dinamika kota. Dari indikator Sumber Daya Manusia, masukan banyak diarahkan perlunya kajian ulang terhadap perhitungan Analisa Beban Kerja (ABK), pembatasan usia maksimal petugas PPSU, dan akses pelatihan peningkatan kompetensi keahlian tertentu. Mengalir ke indikator Prasarana dan Sarana, titik perhatian adalah pentingnya ketercukupan anggaran untuk mengadakan prasarana dan sarana kerja yang memadai. Untuk indikator Sistem Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Program, peningkatan diarahkan untuk membentuk sistem pelaporan digital berbasis teknologi.

c. Evaluasi *Process* (Proses)

Dalam evaluasi aspek *process* bertujuan untuk memeriksa dan memastikan sebuah program dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator yang dinilai adalah Langkah-Langkah Pelaksanaan Program, Kinerja Pelaksanaan Program, Kesesuaian Jadwal Pelaksanaan, Hambatan Pelaksanaan Program. Melalui indikator Kinerja Pelaksanaan Program, secara kinerja personil/individu dapat dikatakan menurun atau fluktuatif (menaik dan menurun). Akan tetapi, jika menilik lingkup tugas secara lebih luas dapat dikatakan telah melebihi ekspektasi tugas. Masukan yang ditujukan untuk peningkatan kinerja individu antara lain penetapan target, pemenuhan prasarana dan sarana tugas, pembinaan mental dan disiplin, serta pemberian motivasi dan rotasi lokasi tugas. Kemudian, dari indikator Hambatan Pelaksanaan Program, masukan menitikberatkan terhadap penguatan kerjasama tim, komunikasi, penambahan/peremajaan perlengkapan kerja.

d. Evaluasi *Product* (Hasil)

Pada akhirnya, melalui evaluasi aspek *product* akan menilai dan memberi analisa dari seluruh capaian dan pengaruh program. Penilaian dilihat dari beberapa indikator berikut: Ketercapaian Program, Dampak

Program, Penggunaan Waktu Pelaksanaan Program dan Biaya Pelaksanaan Program. Ada masukan dalam indikator Dampak Program adalah penguatan kembali partisipasi dan rasa kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah indikator Biaya Pelaksanaan Program yang membutuhkan peningkatan kebutuhan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis yang telah Peneliti laksanakan, secara keseluruhan Evaluasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan menggunakan model evaluasi CIPP melalui 4 (empat) indikator, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ini sudah berjalan baik di Kota Administrasi Jakarta Selatan namun perlu dilakukan beberapa perbaikan.

2. Untuk strategi perbaikan dan peningkatan Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kota Administrasi Jakarta Selatan ke depannya adalah dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta merumuskan rancangan revisi/pembaruan Peraturan Gubernur terkait.

B. Saran

Dari uraian-uraian sebagaimana telah disajikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa saran, baik untuk implementasi strategi yang dihasilkan dari penelitian ini maupun untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Kolaborasi SKPD/UKPD tingkat Provinsi/Kota.
 - Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Tindak lanjut yang diharapkan dari Para Walikota/Bupati adalah usulan dan masukan yang murni berasal dari bawah (*bottom up*). Hal ini dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terarah/*Focus Group Discussion* (FGD) untuk penyesuaian kebutuhan Program PPSU. Secara teknis adalah FGD ini dilaksanakan di setiap wilayah Kota/Kabupaten Administrasi difasilitasi oleh Bagian

Pemerintahan masing-masing Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi. Setiap Bagian Pemerintahan mengajak serta perwakilan setiap Kelurahan dan Kecamatan (Lurah/Camat atau dapat diwakili oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan) yang berada di wilayahnya. Mekanisme pelaksanaan adalah masing-masing perwakilan wilayah diberi simulasi pertanyaan dari berbagai masalah yang terjadi sepanjang Program PPSU ini berjalan. Pada akhirnya, sebuah kesimpulan diambil untuk dijadikan rekomendasi penyesuaian kebutuhan atau pun rancangan peraturan tiap-tiap Kota Administrasi ke tingkat Provinsi sehingga tercipta sebuah model.

- **Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta.**
Kewenangan secara tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah menganalisa beban tugas/kerja perangkat ASN dan juga non ASN. Tindak lanjut yang diharapkan adalah suatu kaji ulang proporsional terkait jumlah petugas PPSU dengan cakupan luas wilayah Kelurahan yang saat ini menjadi acuan. Kondisi saat ini belum dapat dikatakan sempurna. Masih juga ditemukan tumpang tindih kewenangan antara petugas PPSU dan petugas unit SKPD terkait lainnya. Proses pembuatan Analisa Beban Kerja (ABK) baku menjadi muara pembaruan Peraturan Gubernur.
- **Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta**
Tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan. Ketercukupan anggaran menjadi salah satu pertimbangan tindak lanjut. Kaji ulang standarisasi anggaran peralatan/perlengkapan dan fasilitas kerja yang layak. Ini perlu menjadi pertimbangan agar petugas PPSU dapat menunjukkan performa terbaik.
- **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta**
Tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak petugas PJLP yang menangani berbagai bidang tugas dan tersebar di berbagai instansi. Petugas PPSU merupakan bagian dari PJLP. Tindak lanjut yang diharapkan adalah kaji ulang beberapa permasalahan yang muncul dari penelitian, antara lain: peningkatan kinerja dan kemampuan petugas PPSU; pembatasan usia maksimal petugas PPSU untuk memaksimalkan cakupan asuransi ketenagakerjaan; pembagian kewenangan dinas teknis dan kewilayahan; standarisasi pengupahan PJLP dinas teknis dan kewilayahan; penerapan manajemen Alat Pelindung Diri (APD) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

- **Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta**

Adapun peran dari Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah mengumpulkan hasil-hasil rekomendasi FGD tiap wilayah Kota/Kabupaten. Kompilasi hasil rekomendasi FGD dan tindak lanjut kaji ulang kebijakan Biro/Badan terkait akan menjadi bahan rancangan revisi Peraturan Gubernur. Tindak lanjut lainnya adalah penyiapan penerapan sistem pelaporan digital sebagai upaya peningkatan sistem pengawasan dan pembinaan.

2. Perlu adanya penelitian dengan tema evaluasi kebijakan antara Petugas PJLP PPSU dengan Petugas PJLP Dinas-dinas teknis lainnya selama jangka waktu tertentu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Daftar Pustaka

- Ambiyar, & Muharika. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asyifah, S. N., Sunarto, & Likah, S. (2022). Evaluasi Produksi Susu Pasteurisasi Berbasis CIPP di KWT Sumber Rejeki Kota Batu. *Jurnal Peternakan Indonesia*, 24(1), 126–135. <https://doi.org/10.25077/jpi.24.1.104-113.2022>
- Baylis, K., Honey-Rosés, J., Börner, J., Corbera, E., Ezzine-de-Blas, D., Ferraro, P. J., Lapeyre, R., Persson, U. M., Pfaff, A., & Wunder, S. (2016). Mainstreaming Impact Evaluation in Nature Conservation. *Conservation Letters*, 9(1), 58–64. <https://doi.org/10.1111/conl.12180>
- BPS Kota Jakarta Selatan. (2022). *Kota Jakarta Selatan Dalam Angka 2022*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). *Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019-2021*. Retrieved March 16, 2022, from <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/111/1/jumlah-penduduk-provinsi-dki-jakarta-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2017). *Laporan Hasil Survei Kajian KJP, KJS, dan PPSU Terhadap Kesejahteraan Masyarakat DKI Jakarta*.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2019). *Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. 1–102.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2022*.
- Daulima, R., & Katili, A. Y. (2019). Kinerja Petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik STIA Bina Taruna Gorontalo*, VI(2), 136–143. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.15>
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019, Pub. L. No. 152, 65 (2019).
- Ishak, F. N. A., Rus, R. C., & Aminudin, S. I. M. (2017). Evaluation of My

- Kampung My Future Program Effectiveness Based on CIPP Model. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(10), 662–666.
- Karolyn, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 1(2), 52–64.
- Khairunnisa, C., Yasin, Y., & Irawaty. (2019). Analisis Kinerja Petugas PPSU dalam Mengoptimalkan Pelayanan kepada Masyarakat di Kelurahan Balekambang. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 22–29. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/2369>
- Kurnia, E., & Dany, F. W. W. (2021). "Si Oranye" yang Serba Bisa dan Selalu di Depan - *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/07/24/si-oranye-yang-serba-bisa-dan-selalu-di-depan>
- Kurniawan, D. (2013). Evaluasi Program Pengembangan Bahasa. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 4(1), 1–11.
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib Universitas Darussalam*, 6(1), 111–125.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods*. 263.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 68. (2018). *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68*. https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Pergub_No._68_Tahun_2018.pdf
- PPID DKI Jakarta. (n.d.). *Kanal Pengaduan Resmi*. Retrieved August 23, 2021, from <https://ppid.jakarta.go.id/kanal-pengaduan-resmi>
- Putri, J. C., & Rostyaningsih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

- Studi Kasus di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Duri Kepa Jakarta Barat. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 861–875. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V6I2.16222>
- Rinaldoa, E., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Proses Penanganan Sampah Secara Kolaboratif Antara Swadaya Masyarakat dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan. *Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat*, 10(1), 1–13. <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/article/view/309>
- Sari, A. D. P., Wahyuni, I., & Ekawati. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penggunaan APD Pada Pekerja Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) FKM UNDIP*, 7(4), 441–446. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>
- Sarofah, Y., & Giyanto, B. (2020). *Efektivitas Program Pelayanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada Saluran Air Tingkat Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Scriven, M. (1991). *Evaluation Thesaurus*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=koL0Fs_ZSvQC&oi=fnd&pg=PR7&dq=michael+scriven+1991&ots=KaZz1_EeeD&sig=wGMdylxJOFo unH6EIOLazZxhaAU&redir_esc=y#v=onepage&q=michael scriven 1991&f=false
- Shams, B., Golshiri, P., & Najimi, A. (2013). The Evaluation of Mothers' Participation Project in Childre's Growth and Development Process: Using the CIPPEvaluation Model. *Journal of Education and Health Promotion*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.4103/2277-9531.112692>
- Sitompul, N., & Rahayu, S. (2019). Evaluasi Program Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas Netra Menggunakan Model Countenance Stake. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2), 117–128.
- Stufflebeam, D. L. (1971). *The Relevance Of The CIPP Evaluation Model For*

Educational Accountability.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi* (Y. Yuniarsih (ed.); 1st ed.). CV. Alfabeta.
- Sukoco, N. D. (2021). *Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product) di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas*. IAIN Purwokerto.
- Tayibnapis, F. Y. (2000). *Evaluasi Program*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Widodo, F. (2018). Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 5(2), 108–121.
- Yusuf, M. S. A., Man, N., Haris, N. B., Ismail, I. A., & Maruf, A. (2022). Program Evaluation on Urban Agriculture Malaysia: A Review of Evaluation Studies Using CIPP Evaluation Model Approach. *International Journal Of Special Education*, 37(3s), 719–741.
- Zein, M. H. (2021). Implementasi Program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1863–1874.